

**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BLITAR**



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat, Taufik, Bimbingan, serta Hidayah-Nya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2024 yang akan digunakan sebagai pedoman serta landasan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024 sehingga mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran OPD sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renja merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam Renstra tahun 2021-2026. Dokumen ini menyajikan tujuan dan sasaran beserta program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar pada tahun 2024, sesuai hasil evaluasi kinerja renja tahun 2023 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2024, serta pemetaan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BLITAR**



HERMAN WIDODO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang..... 5

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 10

1.4 Sistematika Renja - OPD 11

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022..... 16

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah 16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD..... 48

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 51

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 55

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 65

BAB III 67

TUJUAN DAN SASARAN PD 67

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 67

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 69

3.3 Program dan Kegiatan..... 72

BAB IV..... 91

KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 91

BAB V PENUTUP 94

DAFTAR TABEL

Table 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022.....	17
Table 2 Cross cutting sasaran strategis dan Mapping Indikator	30
Table 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Blitar.....	49
Table 4 Reviu Rencana Kerja RKPD 2023 Diskominfo	58
Table 5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
Table 6 Persentase Capaian IKU Diskominfo.....	70
Table 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	77
Table 8 Rencana Aksi dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Prioritas Diskominfo Tahun 2023.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya, Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) adalah merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada PD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan

Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan R-APBD PD yang bersangkutan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar (RKPD) Tahun 2024. Program, kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi dinas dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar di Jawa Timur sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 17);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

- Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan embaran Daerah Nomor 61);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan lembaran Daerah Nomor 78-3);
24. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar;
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah 2022 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan perangkat daerah dalam pembangunan daerah. Penyusunan Renja tahun 2024 dipergunakan pula untuk mensinergikan ulang kesenjangan yang terjadi setelah dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan renja PD di tahun 2024 serta sebagai tolok ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja tahun 2024 adalah untuk:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Diskominfo tahun 2021-2026 ke dalam rencana tahunan.
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan PD serta merancang kebijakan dan strategi percepatan pembangunan sesuai dengan perubahan kondisi terkini.
4. Sebagai dasar acuan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian

target kinerja program dan kegiatan pembangunan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.

5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Renja - OPD

Secara garis besar, sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023. Mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Capaian Renstra PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas, pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

- Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan.

- Penjelasan mengenai proses alasan tersebut dilakukan.
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.

Telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arah dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir, Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program sebagai berikut:

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk menetapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2023 yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD. Tahun 2024 dalam periode Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah merupakan tahun ketiga pada periode renstra 2021-2026. nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada tahun 2024 menggunakan pemetaan nomenklatur dan indikator yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar melalui 5 Program, 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16,168,564,244,00 (Enam belas miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.019.532.720,00 (lima miliar sembilan belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau sebesar (31%). Nilai realisasi tersebut dari hitungan serapan per semester 1 2022 dan juga adanya pergeseran anggaran sub kegiatan sosialisasi cukai ke Dinas Satpol PP sebesar Rp 2.460.772.497,00.

Berikut tabel hasil evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2022.

Table 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023

no	Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(O utcome)/ Kegiatan(O utput)/ Sub Kegiatan(O utput)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		
				5		6		7		8		9		12=8+9+10+ 11		13=(12/7)*10 0%		14=6+12		15= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			Ki	Kr	Rp
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	98%	1.683.405.477.500	0%	0	92%	4.369.145.857	92%	726.484.688	92%	755.287.385	92%	1.481.772.073	100%	34	92%	1.481.772.073	34	34	2.000
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	92%	500.000.000	51,4%	8.636.500	92%	70.370.000	92%	9.048.000	92%	12.600.000	92%	21.648.000	100%	31	143,4	30.284.500	31	31	2.000

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Renja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	15	2.000.000	99,7	1.530.000	3	43.500.000	1	5.328.000	2	12.600.000	3	17.928.000	100	41	102,7	19.458.000	41	41	2.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	3.000.000	46,6	7.106.500	4	26.870.000	1	3.720.000	1	3.720.000	4	7.440.000	100	28	50,6	14.546.500	28	28	2.000
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel	92	14.230.206.070	92	1.838.985.482	92	3.091.750.651	92	617.953.185	92	590.484.224	92	1.208.437.409	100	39	184	3.047.422.891	39	39	2.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	35	14.080.406.670	64,5	1.825.028.232	27	3.037.962.651	27	609.705.185	27	587.124.224	27	1.196.829.409	100	39	91,5	3.021.857.641	39	39	2.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaa n Tugas	35	137.200.000	38,6	12.960.000	1	45.120.000	1	3.040.000	1	3.360.000	0	6.400.000	0	14	38,6	19.360.000	14	14	0

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	6.599.700	99,8	997.250	7	8.668.000	2	5.208.000	3	-	7	5.208.000	100	60	106,8	6.205.250	60	60	2.000
		Kegiatan Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	98%	1292939980	101	263048050	92	374.871.386	0	35.041.800	92	74.346.348	92	109.388.148	100	29	193	372.436.198	29	29	2.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan yang disediakan	10	52329000	195	51144000	10	11.085.500	0	-	4	17.928.000	10	17.928.000	100	162	205	69.072.000	162	162	2.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14	451730475	190	72930800	14	36.643.801	0	-	30	34.088.676	14	34.088.676	100	93	204	107.019.476	93	93	2.000

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	123603760	127	40924250	6	25.292.085	0	1.513.800	4	15.265.000	6	16.778.800	100	66	133	57.703.050	66	66	2.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	1705	7513000	58,3	875000	1	5.000.000	0	252.000	1	258.000	1	510.000	100	10	59,3	1.385.000	10	10	2.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	6	298668745	114	70945000	6	121.850.000	0	17.415.000	4	11.601.000	6	29.016.000	100	24	120	99.961.000	24	24	2.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398	359095000	26,3	26229000	1	175.000.000	0	15.861.000	1	5.186.000	1	21.047.000	100	12	27,3	47.276.000	12	12	2.000
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98	1305908725	10,6	109227503	92	151.010.000	0	2.210.000	0	2.210.000	92	4.420.000	100	3	102,6	113.647.503	3	3	2.000

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	291	291000000	0	0	27	151.010.000	0	2.210.000	1	2.210.000	27	4.420.000	100	3	27	4.420.000	3	3	2.000
		Sosialisasi Peraturan perundangan.	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1525	1014908725	10,9	109227503	3	26.870.000	1	5.328.000	2	12.600.000	4	17.928.000	133	67	14,9	127.155.503	67	67	2.667
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	98	1019996345	6,6	16185000	92	273.625.900	0	22.951.300	92	23.555.010	92	46.506.310	100	17	98,6	62.691.310	17	17	2.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	70	1019996345	6,6	16185000	14	212.197.000	0	7.029.407	4	5.000.000	14	12.029.407	100	6	20,6	28.214.407	6	6	2.000

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	98	895472369	0	0	92	195.320.920	0	32.250.996	92	47.091.803	92	79.342.799	100	41	92	79.342.799	41	41	2.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat-menyerat	12	20000269	200	8000000	1	4.000.000	0	4.000.000	0	-	4	4.000.000	400	100	204	12.000.000	100	100	8.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	34000000	14,5	723082	1	1.500.000	0	109.176	1	86.573	1	195.749	100	13	15,5	918.831	13	13	2.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	841472100	67,6	123289225	1	189.820.920	0	28.141.820	1	47.005.230	1	75.147.050	100	40	68,6	198.436.275	40	40	2.000
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	98	700947223	62,5	51137500	92	273.625.900	0	22.951.300	92	23.555.010	92	46.506.310	100	17	154,5	97.643.810	17	17	2.000

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	444947223	62,5	51137500	15	141.700.000	0	22.951.300	2	21.189.900	15	44.141.200	100	31	77,5	95.278.700	31	31	2.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1	256000000	93,1	24054345	1	131.925.900	0	-	0	2.365.110	1	2.365.110	100	2	94,1	26.419.455	2	2	2.000
			Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	90	13325279888	0	0	86	2.572.011.546	0	388.876.156	0	373.322.920	86	762.199.076	100	30	86	762.199.076	30	30	2.000

		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	90	13325279888	0	1423111731	60	2.572.011.546	0	388.876.156	0	373.322.920	60	762.199.076	100	30	60	2.185.310.807	30	30	2.000
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diseminasi informasi di media intern	12	11220479888	37	887475420	1	1.663.499.374	0	227.702.300	1	297.299.500	1	525.001.800	100	32	38	1.412.477.220	32	32	2.000
		Pelayanan Informasi Publik	Pembinaan PPID pembantu	54	822300000	250	318319393	1	506.026.150	-	62.399.800	-	41.562.000	1	103.961.800	100	21	251	422.281.193	21	21	2.000
		Monitorin g Opini dan Aspirasi Publik	Hasil survey kepuasan masyarakat	9	1282500000	39	217316918	2	402.486.022	0	98.774.056	1	34.461.420	2	133.235.476	100	33	41	350.552.394	33	33	2.000
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9000%	30285071127	0	0	50	4.764.000.000	25	649.164.096	30	460.562.820	50	1.109.726.916	100	23	50	1.109.726.916	23	23	2.000

			Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	100 %		0	0	3	26.870.000	1	5.328.000	2	12.600.000	4	17.928.000	133	67	4	17.928.000	67	67	2.667
		<i>Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo</i>	155	31785133562	3212	1850647500	100	4.127.500.000	50	528.606.000	100	424.868.056	100	953.474.056	100	23	3312	2.804.121.556	23	23	2.000
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan backbone	54	31785133562	3212	1850647500	3	26.870.000	1	5.328.000	2	12.600.000	4	17.928.000	133	67	3216	1.868.575.500	67	67	2.667
		<i>Kegiatan Pengelolaan e-governme nt di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government</i>	23	4444365624	1522	323173614	3	26.870.000	1	5.328.000	2	12.600.000	4	17.928.000	133	67	1526	341.101.614	67	67	2.667

		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pemerintah Daerah Yang Dibangun	20	2316907927	9288	252338428	52	214.584.384	1	111.433.096	2	17.747.764	4	129.180.860	8	60	9292	381.519.288	60	60	154
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah dokumen monitoring smart city	5	655429659	1069	10667750	1	113.253.828	1	-	2	1.120.000	4	1.120.000	400	1	1073	11.787.750	1	1	8.000
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi internal SPBE	5	944238128	1621	23452000	1	71.042.788	0	3.045.000	1	1.120.000	1	4.165.000	100	6	1622	27.617.000	6	6	2.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah	Jumlah Workshop TIK	15	827066128	729	36715436	3	26.870.000	1	5.328.000	2	12.600.000		17.928.000	0	67	729	54.643.436	67	67	0

		PROGRA M PENYELE NGGARA AN STATISTI K SEKTOR AL	Persentase Perangkat Daerah yang mengguna kan data statistik dalam menyusun perencana an dan evaluasi pembangu nan daerah	90%	360000 0000	0	0	7 0 %	871.514.84 8	0%	28.3 77.4 20	10 0%	43 .9 17 .3 01	70 %	72.294 .721	1 0 0	8	0 , 7	72.294.7 21	8	8	2.000
		<i>Kegiatan Penyeleng garaan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kab/ Kota</i>	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunak an data statistik dalam menyusun perencanaa n dan evaluasi pembangun an daerah</i>	52	360000 0000	178	2419 1511 2	5 2	871.514.84 8	52	28.3 77.4 20	0	43 .9 17 .3 01	52	72.294 .721	1 0 0	8	2 3 0	314.209. 833	8	8	2.000
		Koordinas i dan Sinkronis asi Pengump ulan Pengolaha n Analisis dan Disemina si Data Statistik Sektoral	Jumlah Database Statistik Sektoral	52	115000 0000	50	9501 4112	4	489.031.34 8	0	21.4 58.4 20	0	14 .3 78 .3 36	4	35.836 .756	1 0 0	7	5 4	130.850. 868	7	7	2.000

		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Design Arsitektur Data	1	2450000000	1	146901000	1	382.483.500	0	6.919.000	0	29.538.965	1	36.457.965	1000	10	2	183.358.965	100	10	2.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMATAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100	58970413	0	0	70	98.709.400	70	-	70	6.411.000	70	6.411.000	1000	6	70	6.411.000	6	6	2.000
		<i>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamatan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian</i>	85%	58970413	102	6374192	70	98.709.400	70	-	70	6.411.000	70	6.411.000	1000	6	172	12.785.192	6	6	2.000
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non	Jumlah aplikasi persandian yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE	20	58970413	102	6374192	1	98.709.400	0	-	1	6.411.000	1	6.411.000	1000	6	103	12.785.192	6	6	2.000

Table 2 Cross cutting sasaran strategis dan Mapping Indikator

No	Kepmen 050-5889 Tahun 2020 (Ranwal Renja)					Kepmen 050-5889 Tahun 2021					GIVEN SIPD	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target
					Tahun 2022					Tahun 2023		Tahun 2023
					Target					Target		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	92%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	94%		
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	94%		

				yang sesuai dengan peraturan			at Daerah					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	3 dokumen			"Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	4 dokumen			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen		
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang disediakan Jumlah Laporan Administrasi	4 dokumen		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	94 %		

				Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu								
			Penyedi aan Gaji dan Tunjang an ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	27 orang			Penyedi aan Gaji dan Tunjang an ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/b ulan		
			Penyedi aan Adminis trasi Pelaksa naan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan adminstras i pelaksanaa n tugas	27 orang			Penyedi aan Adminis trasi Pelaksa naan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN	1 dokume n		
			Koordin asi dan Penyus unan Laporan Keuang an Bulana n/Triwu lanan /Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan bulanan/tri wulan /semestera n OPD	5 dokumen 2 dokumen			Koordin asi dan Penyus unan Laporan Keuang an Bulana n/ Triwula nan/ Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan /Semestera n SKPD	7 dokume n		

		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	30 orang		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94 %		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	0 Orang			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan	270 orang							
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100 %		

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 jenis			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	6 jenis			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 eksemplar			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket		

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	341 eksemplar			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	98 kali			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan		
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	14 jenis bulan		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat sasaran	94 %		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau	14 set			Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	14 unit		

			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang diadakan				Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	94 %		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan		

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan		
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	94 %		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit		

			Dinas Jabatan					Dinas Jabatan				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan rumah jabatan /dinas yang mendapat pemeliharaan	1 jenis			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		
	2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	80%	2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	88%		

		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah layanan informasi	300 berita		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan Informasi	300 berita		
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi dan akses informasi	2 kali			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 dokumen		
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah cakupan informasi yang didesiminasikan melalui media pemerintah dan non pemerintah	100 %			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen		
			Pelayanan Informasi Publik	Cakupan pelayanan permohonan	100%			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Berita Acara		

				informasi publik sesuai UU no 14 tahun 2008					Informasi Publik			
	3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	30%	3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%		
				Persentase Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK	100%				Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	100%		
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas	52 OPD		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas	100%		

		Kabupaten /Kota		Kominfo			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kominfo			
			Penyele nggaraa n Sistem Jaringa n Intra Pemerin tah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan backbone pemkab blitar	52 OPD			Penyele nggaraa n Sistem Jaringa n Intra Pemerin tah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	154 unit		
		Pengelolaan e-governmen t Di Lingkup Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egoverneme nt	2 kebijakan		Pengelolaan E-governm ent di Lingkup Pemerin tah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-governmen t	19 kebijak an		
			Pengemb angan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerin tahan	Jumlah perangkat daerah yang mengimple mentasikan layanan aplikasi	52 OPD			Pengelolaan Pusat Data Pemerin tahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah an Daerah yang Dikelola	1 unit		

			Berbasis Elektronik	umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan								
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah dokumen monitoring smart city	4 laporan			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	52 Unit		
				Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smartcity	52 OPD			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen		

			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas Kominfo	1 orang			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen		
				Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web sesuai standar	52 OPD			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi internal SPBE	1 laporan							

			Ekosistem SPBE									
	3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	50%	3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	80%		
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah survey statistik sektoral dan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2 kali		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah survey statistik sektoral dan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2 kali		

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan dan mendapat rekomendasi BPS	4 dokumen			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen		
				Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai jenis siklus datanya	52 OPD							
			Memangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah kelengkapan metadata indikator sektoral	1 dokumen			Memangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dokumen		
				Jumlah kelengkapan metadata statistik sektora	1 dokumen							

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100 %	PROGRA M PENYEL ENGGAR AAN PERSAN DIAN UNTUK PENGAM ANAN INFORM ASI			Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	100%		
		Penyeleng garaan Persandia n untuk Pengaman an Informasi Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Sistem Elektronik yang telah menerapka n prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	100%		Penyele nggaraa n Persandi an untuk Pengam anan Informa si Pemerin tah Daerah Kabupat en/Kota		jumlah sistem elektronik yang telah menerapka n prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	75 %		
			Pelaksa naan Keaman an Informa si Pemerin tahan Daerah Kabupa	Presentase sistem elektronik (aplikasi) yang telah menerapka n prinsip aplikasi persandian	60 %			Pelaksa naan Keaman an Informa si Pemerin tahan Daerah Kabupa	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Keamanan Informasi Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan		

			ten/Kot a Berbasi s Elektro nik dan Non Elektro nik					ten/Kot a Berbasi s Elektro nik dan Non Elektro nik	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Blitar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan lainnya;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran di Diskominfo;
- c. penyusunan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, data dan statistik;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, data dan statistik;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Diskominfo.

Dalam melaksanakan pelayanan didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sejumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang. Selain didukung oleh sumber daya aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Diskominfo juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia. Untuk pelaksanaan kegiatannya Diskominfo bekerja sama juga dengan RTIK dan LPPL Persada. Kedua organisasi ini dibawah binaan Diskominfo yang sebagai tugasnya untuk membantu Diskominfo dalam penyebaran informasi ke masyarakat dan juga untuk membantu dalam bimbingan teknis untuk peningkatan sumber daya manusia agar pemanfaatan teknologi tidak sia sia.

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan layanan publik berbasis elektronik. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 3 terlampir :

Table 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	
2	Nilai Tata Kelola SPBE			-	4,22	4,25	4,27	2,60	2,30	-	-	4,30	4,32	
3	Nilai Layanan SPBE			-	4,28	4,29	4,30	3,20	3,51	-	-	4,32	4,34	

Dari tabel diatas dapat diketahui Capaian Kinerja pelayanan Diskominfo Kabupaten Blitar untuk IKU belum sesuai target yang dicanangkan pada Renstra Diskominfo karena berbagai hal, yaitu adanya masa transisi perubahan IKU mengikuti RPJMD 2021-2026 pada tahun 2022 dan adanya perubahan parameter indikator penilaian terhadap Nilai Tata Kelola SPBE dan Nilai Layanan SPBE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, berupa tambahan dan perubahan bobot indikator, sehingga nilai Indeks SPBE rata-rata seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami penurunan. Maka, berdasar hasil rapat internal disepakati untuk melakukan penurunan target IKU menjadi diantar 3-3,1, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya perubahan aturan dalam penilaian SPBE.

Nilai indeks SPBE Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sebesar 2,14 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,9, atau lebih tinggi dibanding rata-rata Nilai Indeks SPBE Nasional sebesar 2,18. Adapun pada tahun 2020 berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/386/M.KT.03/2020 perihal Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2020, Kabupaten Blitar tidak termasuk di dalam 130 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diambil sebagai sampling evaluasi SPBE. Pada tahun 2021 terdapat penambahan indikator dari 37 menjadi 47 indikator dalam penilaian SPBE, sehingga berdampak terhadap capaian nilai Indeks SPBE. Adapun Tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Blitar sebesar 2,61 atau masuk kategori “Baik”. Capaian ini memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,76, namun masih lebih tinggi dibanding rata-rata Indeks SPBE Nasional sebesar 2,35. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2022 oleh Kementerian PAN dan RB, dari 4 domain penilaian SPBE (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE), domain Manajemen SPBE memiliki nilai yang terendah. Domain ini terdiri dari aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK, termasuk Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data. Ke depan, aspek-aspek inilah yang perlu diperkuat kinerjanya, terlebih dengan kebijakan satu data, maka Manajemen Data SPBE menjadi penting karena menentukan kualitas pengelolaan data sehingga dapat diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Identifikasi permasalahan yang masih terjadi pada tahun 2023 ada 4 hal, yaitu *pertama*, belum optimalnya capaian Indeks SPBE; *kedua*, cakupan wilayah/ ruang publik terkoneksi internet masih perlu diperluas, sebagai bagian dari upaya untuk penguatan program *smart city*; *ketiga*,

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Diskominfo sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 dan tabel 3 maka yang menjadi isu utama dalam pencapaian kinerja Diskominfo adalah adanya perubahan indikator pada RPJMD baru sehingga mempengaruhi perubahan IKU dinas menjadikan prioritas kinerja OPD berubah. Kurang selarasnya indikator untuk tiap dokumen sehingga mempengaruhi capaian kinerja dan juga kurangnya review dan monitoring terhadap adanya aturan-aturan baru yang mempengaruhi perubahan-perubahan target dan capaian kinerja dinas. Selain itu, adanya perubahan paramater indikator penilaian terhadap Nilai Tata Kelola SPBE dan Nilai Layanan SPBE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, berupa tambahan dan perubahan bobot indikator, sehingga berdampak terhadap capaian nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami capaian penurunan.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Diskominfo tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mencapai target. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pelayanan publik perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal dilingkungan pemerintah daerah kabupaten blitar;
2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat secara lebih luas diseluruh pemerintahan kabupaten Blitar;
3. Memperkuat jaringan komunikasi internet diseluruh wilayah kabupaten Blitar agar tercapainya target layanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur khususnya dalam bidang keamanan informasi seiring dengan makin maraknya aksi kejahatan *cyber* untuk mengambil berbagai data-data kegiatan pemerintahan.
5. Dalam situasi yang mulai membaiknya kondisi pasca pandemi covid 19 dan mulai menggeliatnya ekonomi di tahun 2022, diharapkan kualitas layanan Diskominfo semakin baik karena menjadi bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya. Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam publikasi pembangunan daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab Blitar terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan informasi belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.
2. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja dan luasnya wilayah yang ditangani.
3. Masih terdapat masyarakat yang belum mendapat akses internet.
4. Masih terdapat masyarakat yang belum melek digital literasi.
5. Infrastruktur digital masih belum tersebar luas dengan kualitas yang cukup.
6. Keterbatasan jumlah SDM aparatur dalam bidang Teknologi Informasi di khususnya untuk mengelola infrastruktur jaringan TI dan menangkal berbagai potensi serangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*).
7. Perkembangan dunia TIK yang sangat cepat dan massif, berdampak pada tingkat kemampuan kompetensi SDM aparatur bidang TIK yang harus diupdate.
8. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mandiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam optimalisasi pelayanan.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan layanan publik berbasis elektronik di daerah.

- c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- d. Membuat kebijakan terkait dengan pelayanan publik dan daerah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan OPD lain melalui digital literasi.
- e. Peningkatan kesadaran apartur dalam tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik sehingga sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkan dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka visi Kabupaten Blitar adalah: *“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)”*

Misi :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan

Tujuan :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berpersepektif gender .
3. Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Sasaran :

1. Menurunya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
2. Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat.

3. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan.
4. Meningkatnya Kualitas Kepemudaan
5. Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa.
6. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
7. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat.
8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan.
9. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dalam hal perbandingan dengan rumusan awal RKPD, Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2023 mengalami perubahan, yaitu semua Sub Kegiatan mengalami penyesuaian indikator sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021. Berdasarkan hasil penyesuaian indikator, evaluasi renja dan evaluasi kinerja serta analisis kebutuhan, maka perlu dilakukan beberapa perubahan baik dalam penetapan target, maupun pendanaan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan daerah. Beberapa perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan Indikator. Sub Kegiatan mengalami penyesuaian indikator sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021.
2. Perubahan Target. Beberapa target kinerja diubah disesuaikan dengan kondisi akhir triwulan ke-2 (capaian kinerja) Tahun 2023 sebagaimana dilaporkan dalam Evaluasi Renja dan penyesuaian indikator juga menyesuaikan beberapa target yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Perubahan Kebutuhan Dana. Kebutuhan Dana lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan dan sub kegiatan.
4. Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas. Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sesuai dengan surat edaran.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel 4 terlampir:

Table 4 Reviu Rencana Kerja RKPD 2024 Diskominfo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	98%	4.928.197.102	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	98%	4.928.197.102	
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	94%	75.964.255	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	94%	75.964.255	
	Administrasi Keuangan	Kab. Blitar	Persentase Laporan	94%	3.090.500.651	Administrasi Keuangan	Kab. Blitar	Persentase Laporan	94%	3.090.500.651	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel			Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94%	148.260.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94%	148.260.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	94%	377.051.163	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	94%	377.051.163	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94%	247.991.379	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94%	247.991.379	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
			yang tepat sasaran					yang tepat sasaran			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	94%	110.053.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	94%	871.086.810	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	94%	7.289.844	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	94%	117.342.844	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Kab. Blitar	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi (hasil survey KIM)	86%	1.826.033.000	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Kab. Blitar	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi (hasil survey KIM)	86%	1.826.033.404	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Kab. Blitar	Persentase diseminasi dan	300 berita	1.826.033.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Kab. Blitar	Jumlah layanan Informasi	300 berita	1.826.033.404	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM			Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Blitar	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	70% 100%	4.203.244.593	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Blitar	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	70% 100%	4.203.244.593	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang	100%	3.461.421.577	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	Kab. Blitar	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses	100%	3.461.421.577	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Kabupaten/Kota		disediakan oleh Dinas Kominfo			Daerah Kabupaten/Kota		internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	19 kebijakan	741.823.016	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	19 kebijakan	741.823.016	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Blitar	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	80%	747.854.832	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Blitar	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	80%	747.854.832	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun	2 kali	747.854.832	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Kab. Blitar	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam	2 kali	747.854.832	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
			perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah			Kabupaten/Kota		menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah			
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Blitar	Jumlah Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi SMK dan atau persandian Perse ntase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	100%	115.551.720	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Blitar	Jumlah Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi SMK dan atau persandian Perse ntase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	100%	115.551.720	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab. Blitar	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	75%	115.551.720	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	75%	115.551.720	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
						Kabupaten/kota					

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan wajib bukan pelayanan dasar pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sehingga Diskominfo melakukan tugas koordinatif sesuai dengan kewenangannya dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian daerah yaitu membantu Bupati dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan pelayanan publik daerah yang ada di Wilayah Kabupaten Blitar Membuat kebijakan terkait pelayanan informasi pembangunan daerah serta melakukan sosialisasi teknologi informasi kepada masyarakat.

Table 5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab Blitar	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	1 usulan Musrenbang	Jumlah Anggaran Rp. 4.203.244.593
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses	2 usulan Musrenbang	

			internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	10 usulan Musrenbang dan 1 usulan Pokir DPRD	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab Blitar	Jumlah Workshop TIK		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional periode 2020-2024 memiliki visi ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk tema RKPD Provinsi Tahun 2024 adalah “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Infrastruktur menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak; Penguatan Transformasi Ekonomi didukung Infrastruktur serta Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing menuju Masyarakat Jawa Timur yang Mandiri dan Sejahtera; Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong serta Digitalisasi dalam Pelayanan Publik, yang meliputi:

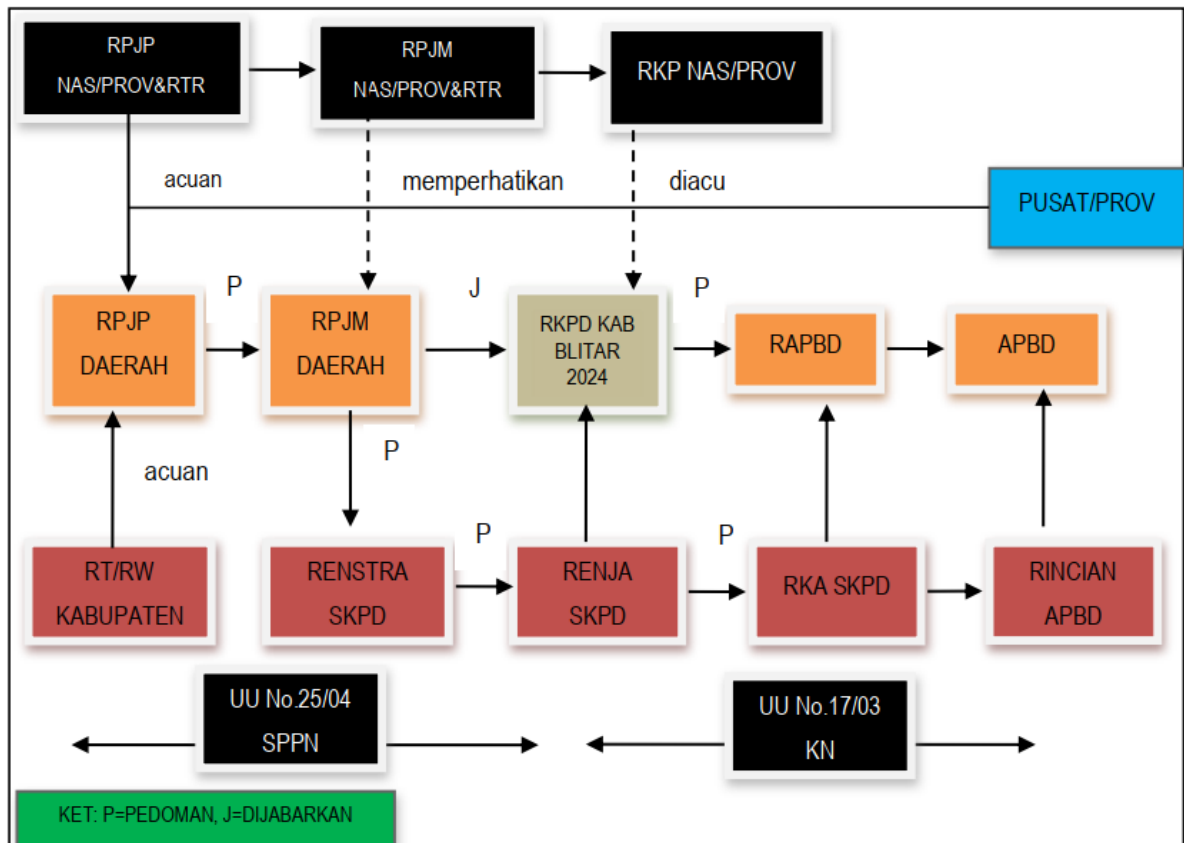
1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
5. Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

Sedangkan untuk tema pembangunan daerah Kabupaten Blitar adalah“ Memantapkan Produktivitas Ekonomi Yang Berorientasi Ekspor dan Perluasan Pasar Melalui Penguatan SDM, Infrastuktur yang Berkelanjutan dan Stabilitas Sosial-Politik”, dengan prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor dan Perluasan Pasar;
2. Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing serta Penguatan Perlindungan Sosial;
3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak.

Gambar 2.1

Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



Sumber : RKPD Kabupaten Blitar, 2024.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah tidak secara langsung turut melaksanakan Prioritas Nasional, namun demikian, sebagai unsur pelaksana urusan daerah, Diskominfo berkewajiban untuk menjamin keselarasan Perencanaan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang dilakukan melalui penyusunan RKPD yang selaras dengan RKP, dan memastikan OPD dalam menyusun Renja juga selaras dengan dokumen di atasnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam satu sasaran



yaitu meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE. Rencana Kerja Diskominfo didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur Diskominfo yang profesional dan kredibel melalui literasi digital.
2. Meningkatkan pelayanan publik berbasis *e-government*.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai standar SPBE dan akuntabel.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berkaitan dengan dengan tujuan dan sasaran tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu OPD di lingkup Kab Blitar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk merumuskan melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik, penyelenggaraan *E-government*, statistika sektoral dan persandian memilik peran penting dalam terwujudnya meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sesuai tercantum dalam dokumen renstra 2021-2026 adalah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan Penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi. Selanjutnya tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang diukur dengan indikator Persentase layanan publik yang sesuai dengan standar SPBE.

Table 6 Persentase Capaian IKU Diskominfo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian tahun 2022	Target Tahun 2024
	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	4,22 4,28	4,27 4,30

	penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi		Nilai Layanan SPBE		
--	---	--	--------------------	--	--

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dilakukan melalui penetapan strategi dan arah kebijakan, yaitu:

1. Strategi-1: Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
 - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada ruang publik;
 - Meningkatkan pembangunan aplikasi sesuai standart SPBE untuk mewujudkan *e-government* terintegrasi;
 - Meningkatkan pengetahuan pengelolaan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Aparatur;
 - Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk mendukung *e-government*
2. Strategi-2: Peningkatan Komunikasi Publik, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
 - Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi penangkalan berita hoax;
 - Meningkatkan Literasi Digital kepada Masyarakat;
 - Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat.
3. Strategi-3: Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Statistik, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
 - Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah;
 - Mengoptimalkan Penerapan Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital;
 - Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah melalui Berbagai Media;
 - Meningkatkan Kerjasama dengan BPS dalam Penerbitan Produk Data Statistik;
 - Membangun Data Center yang baik dan Terintegrasi;

- Meningkatkan Pembinaan dan Penguatan Regulasi terkait Pemanfaatan Data seluruh Perangkat Daerah.
4. Strategi-4: Peningkatan Pelayanan Parsandian, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
- Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Persandian dan Telekomunikasi;
 - Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika;
 - Meningkatkan Pemerataan Pengetahuan dan Literasi terkait Keamanan Sistem Informasi yang Berpedoman pada Indeks Keamanan Informasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 Diskominfo Kabupaten Blitar merencanakan akan melaksanakan sebanyak 5 Program dan 12 kegiatan didukung oleh 31 sub kegiatan :

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan 10 paket
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 paket.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 paket.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 6 paket
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan: 1 dokumen



- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 1 laporan
- 2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran 14 unit.
- 3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 orang.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Adapun indikatornya adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Adapun indikatornya adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7 laporan
- 4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen yang disusun, ditargetkan sebanyak 3 dokumen, Renstra, Renja, Renja-P
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen yang disusun, ditargetkan sebanyak 5 dokumen, yaitu LKjIP, Laporan Capaian Kinerja, Tribulan, Renaksi Evaluasi, LPPD, LKPJ.

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, Adapun indikatornya adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Adapun indikatornya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Adapun indikatornya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Adapun indikatornya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Adapun indikatornya adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 unit.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Adapun indikatornya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten.

- a. Pengelolaan Media Komunikasi. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2 dokumen.
- b. Pelayanan Informasi Publik. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 1 dokumen.
- c. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi 2 dokumen.

Program Aplikasi Informatika

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.
 1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Adapun indikatornya adalah Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, Balai Penyuluh Pertanian, Laboratorium, Pasar, Pelayanan Publik, Area Publik (154 titik);
- b. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten.
 1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik Adapun indikatornya adalah jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan 52 unit
 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Adapun indikatornya adalah 1 dokumen
 3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas. Adapun indikatornya adalah jumlah dokumen program inovasi

yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan smartcity 1 dokumen.

4. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE. Adapun indikatornya adalah dokumen monitoring , evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE 1 dokumen
5. Pengelolaan pusat data pemerintah daerah. Adapun indikatornya adalah pusat data pemerintah daerah yang dikelola 1 unit

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten.
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Adapun indikatornya adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 4 dokumen.
 2. Membangun Meta data Statistik Sektoral. Adapun indikatornya adalah Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 dokumen

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
 1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adapun indikatornya adalah 1 laporan.

Table 7
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun 2024 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Blitar	98 %	4.928.197.102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95 %	3.798.818.159
	<i>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Blitar	94 %	75.964.255	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	4.900.000

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah yang disusun	Kab. Blitar	3 dokumen	50.304.255	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	2.400.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	4 laporan	25.660.000			4 laporan	2.500.000
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Kab. Blitar	94 %	3.090.500.651	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	2.846.041.214
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	27 orang/bulan	3.307.962.651	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Orang/bulan	2.814.741.214
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Blitar	1 dokumen	41.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	28.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Blitar	7 laporan	11.418.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 laporan	3.300.000
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	94%	148.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	60.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Blitar	0 orang	148.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 orang	60.000.000

	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Kab. Blitar	94%	377.051.163	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	259.880.945
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	10 paket	10.427.263	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 paket	10.525.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	14 paket	37.966.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 paket	89.586.095
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	6 paket	122.100.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 paket	60.150.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Kab. Blitar	6 paket	52.945.321	Dana Transfer Umum-Dana		6 paket	24.720.850

		Penggandaan yang Disediakan				Alokasi Umum			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Blitar	1 dookumen	1.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1,500,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	1 laporan	151.861.909	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	73.399.000
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	Kab. Blitar	94 %	247.991.379	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	275.854.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	Kab. Blitar	14 unit	247.991.379	Dana Transfer Umum-Dana		14 unit	275.854.000

		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Alokasi Umum			
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah</i>	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Kab. Blitar	94 %	871.086.810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	196.310.269
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Blitar	1 laporan	4.162.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	4.200.269
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Blitar	1 laporan	6.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	7.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	1 laporan	860.374.310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	185.110.000
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kab. Blitar	92 %	117.342.844	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92%	155.831.731
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, kaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Blitar	15 unit	110.053.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 unit	97.831.731
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kab. Blitar	1 unit	7.289.844	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	58.000.000

		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi							
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	Kab. Blitar	86%	1.826.033.404			86%	2.799.613.610
	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	Kab. Blitar	60%	1.826.033.404	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 %	2.799.613.610
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Blitar	2 dokumen	241.492.690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	275.000.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	Kab. Blitar	1 dokumen	1.294.795.000	Dana Transfer Umum-Dana		1 dokumen	2.324.613.610

		Pengelolaan Media Komunikasi Publik				Alokasi Umum			
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Blitar	1 dokumen	289.745.714	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	200.000.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	Kab. Blitar	50 persen 100 persen	4.203.244.593	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 persen 100 persen	1.063.859.078
	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses	Kab. Blitar	100%	3.461.421.577	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	0

		internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo							
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemenntah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Blitar		3.461.421.577			154 unit	0
	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	Kab. Blitar	154 unit	741.823.016	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20 kebijakan	1.063.859.078
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab. Blitar	1 unit	104.559.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 unit	155.600.000
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bas Pemenntahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Blitar	52 unit	302.473.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		52 unit	391.907.927

	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kab. Blitar	1 dokumen	123.601.428	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	144.644.151
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	1 dokumen	87.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	176.707.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Kab. Blitar	1 dokumen	123.269.188	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	195.000.000

	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Blitar	70%	747.854.832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70%	700.000.000
	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Blitar	52 OPD	747.854.832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 OPD	700.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Kab. Blitar	4 dokumen	588.385.832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 dokumen	190.000.000

		Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Blitar	1 dokumen	159.469.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	510.000.00
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	Kab. Blitar	100%	115.551.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.342.032
	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</i>	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	Kab. Blitar	70%	115.551.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70%	15.342.032
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	1 laporan	115.551.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	15.342.032

		Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
	TOTAL				11.820.881.720				8.377.632.879

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar mengampu dua urusan pemerintahan daerah yaitu dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar pada tahun 2024 merencanakan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebanyak 5 program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai Rp. 11.820.881.651,-.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun 2024 diatas, maka diperlukan langkah-langkah yang strategis yang dijabarkan dalam Rencana Aksi dan pagu indikatif tiap kegiatan prioritas sebagai berikut :

Table 8
Rencana Aksi dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Prioritas Diskominfo Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2022	Rencana Aksi	Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)	Keterangan
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik		1.826.033.404	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.826.033.404	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		241.492.690	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		1.294.795.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		289.745.714	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah

2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		4.204.244.593	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3.461.421.577	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemenntah Daerah		3.461.421.577	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		741.823.016	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		104.599.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bas Pemenntahan Berbasis Elektronik		302.473.400	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		123.601.428	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		87.880.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		123.269.188	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		747.854.832	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		747.854.832	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		588.385.832	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Membangun Metadata Statistik Sektoral		159.469.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		115.551.720	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah

	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota		115.551.720	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		115.551.720	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah

BAB V PENUTUP

Seiring berkembangnya situasi dan kondisi, masyarakat kabupaten Blitar khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya mulai melakukan pemulihan pasca covid 19. Dalam hal ini pemerintah kabupaten Blitar berupaya mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar. Yaitu dengan menyasar kegiatan-kegiatan luring seperti sosialisasi dan bimbingan teknis dibidang teknologi dan juga ekonomi yang sudah diperbolehkan oleh pemerintah pusat dan mulai normal baru endemi covid 19 ini. Dengan kondisi pemulihan seperti ini diharapkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dapat berjalan secara normal seperti sebelum pandemi dan semua target tercapai. Sehingga kualitas output tidak berkurang.

Disamping itu diakhir tahun 2023 dan menjelang 2024 adalah tahun politik Pemilu 2024. Sedikit banyak hal tersebut mempengaruhi target dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Meskipun demikian diharapkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian tetap pada hasil optimal untuk melayani masyarakat karena itu merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

Dalam situasi ini yang tidak boleh terlupakan adalah keberlanjutan usaha pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Dimana poin ini menjadi fokus utama dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam rangka audit kinerja tahun 2022. Melalui e-government ini pula diharapkan bahwa pelayanan publik dapat menjadi maksimal, efektif, dan efisien. Terlebih dalam situasi di masa pandemi ini.

Dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja Dinas Kominfo di tahun 2024 ini tentu mendapati berbagai hambatan dan tantangan selain terkait perubahan eksternal, perubahan kebijakan dari pusat, terbatasnya SDM , antara lain bahwa saat ini kompetensi aparatur Diskominfo masih kurang sesuai

standar, sehingga didalam internal Diskominfo sendiri akan melakukan bimtek terkait teknologi sehingga semua aparatur akan memiliki kompetensi yang sama dan sesuai standar. Serta isu isu lain yang sekiranya dapat mempengaruhi kinerja Diskominfo, sudah sepatutnya Diskominfo peka dan cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan. Melalui penyusunan rencana kerja Dinas Kominfo tahun 2024 ini diharapkan bahwa tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi tetap dapat terwujud.

Selanjutnya jika di dalam perencanaan program dan kegiatan terdapat ketidaksesuaian baik dikarenakan situasi tertentu sehingga menyebabkan dilakukannya perubahan struktural ataupun perubahan lainnya termasuk realokasi/refocusing anggaran maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tetap berkomitmen untuk memaksimalkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah direncanakan.

Kaidah-kaidah :

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber daya yang tersedia;
2. Memperhatikan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
3. Permasalahan yang ada dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
4. Tujuan yang ingin dicapai;
5. Kebijakan, sasaran dan prioritas perangkat daerah untuk mencapai tujuan;
6. Prioritas tema pembangunan pemerintah saat ini untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Tindak Lanjut :

Selanjutnya dalam rangka tindak lanjut daripada rencana kerja tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

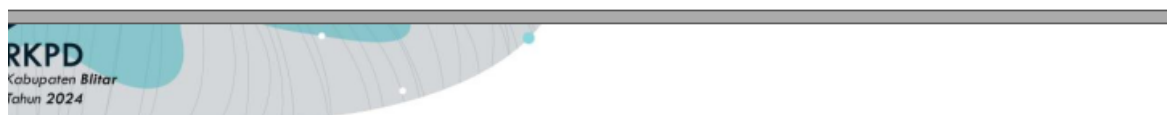
pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di sisi lain melebihi target yang telah direncanakan. Untuk itu diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target.

Sebagai penutup apabila terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kedepannya diharapkan untuk lebih intens dalam peningkatan kualitas perencanaan sehingga perangkat daerah mampu untuk mencapai target kinerja program maupun kegiatan dan memiliki kualitas indikator kinerja yang jauh lebih baik dan smart.

Blitar, 03 Agustus 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK, DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN BLITAR

HERMAN WIDODO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001

			Jumlah	46.561.953.444
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	4.928.197.102
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	88%	1.826.033.404
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK	100 % 100 %	4.203.244.593
			Jumlah	10.957.475.099
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
	Dinas Komunikasi dan Informatika			



Kode	Perangkat Daerah/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	747.854.832
			Jumlah	747.854.832
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	115.551.720
			Jumlah	115.551.720

9	Indeks SPBE	Indeks	2,61	3,6	3,8	4,1
10	Indeks Sistem Merit	Indeks	210,5	230	255	305

T.	Urusan Statistik						
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Statistik
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	

U.	Urusan Persandian						
1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	0	1	1	1	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Persandian
2	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	Tim	1	1	1	1	
3	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	0	2	2	2	

P.	Urusan Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	%	100	100	100	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
2	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	%	70	60	70	90	
3	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	Aplikasi	74	80	84	88	
4	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	%	75	45	75	50	
5	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100	100	100	100	
6	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Orang	233	208	233	260	
7	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Orang	537	450	537	550	

8	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	%	100	100	100	100	
9	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	%	84,37	86	88	90	
10	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008	%	97	100	100	100	
11	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	%	22,58	100	100	100	

